



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 52, Kota Padang

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN
(LAKIP) TAHUN 2020**

| JANUARI 2021

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dapat melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020 dengan tepat waktu.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

LAKIP Dinas Pendidikan tahun 2020 merupakan laporan kinerja tahun kelima dari periode Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan tahun 2016-2021.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2020.

Pada perjanjian kinerja Dinas Pendidikan tahun 2020 ditetapkan 5 sasaran strategis dan 16 indikator kinerja, yang dijabarkan dalam 8 program pembangunan Pendidikan. Secara umum Dinas Pendidikan berhasil merealisasikan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut.

Tantangan dan permasalahan saat ini yang masih harus diselesaikan di antaranya, kondisi system informasi teknologi pembelajaran belum memadai, kecukupan kompetensi dan pelatihan guru rendah, lingkungan sekolah yang kurang menyenangkan karena cenderung dengan mudah disusupi paham radikalisme, serta peningkatan tata kelola (*good governance*). Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan program/kegiatan dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang pendidikan di tahun mendatang.

Padang, Januari 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Adib Alfikri, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19730413 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	1
B. Aspek Strategis	8
C. Permasalahan Utama (<i>strategic issued</i>)	8
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	9
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020	11
B. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2020	14
C. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020.....	17
D. Realisasi Anggaran Tahun 2020	32
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	40
B. Saran/Rekomendasi	41
 LAMPIRAN.....	 42



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan sejak tanggal 2 Mei 2019 dijabat Bapak Adib Alfikri, SE, Msi, menggantikan Drs. Burhasman MM.

1. Tugas

Melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendidikan (SK Gubernur No:46 Tahun 2017)

2. Fungsi

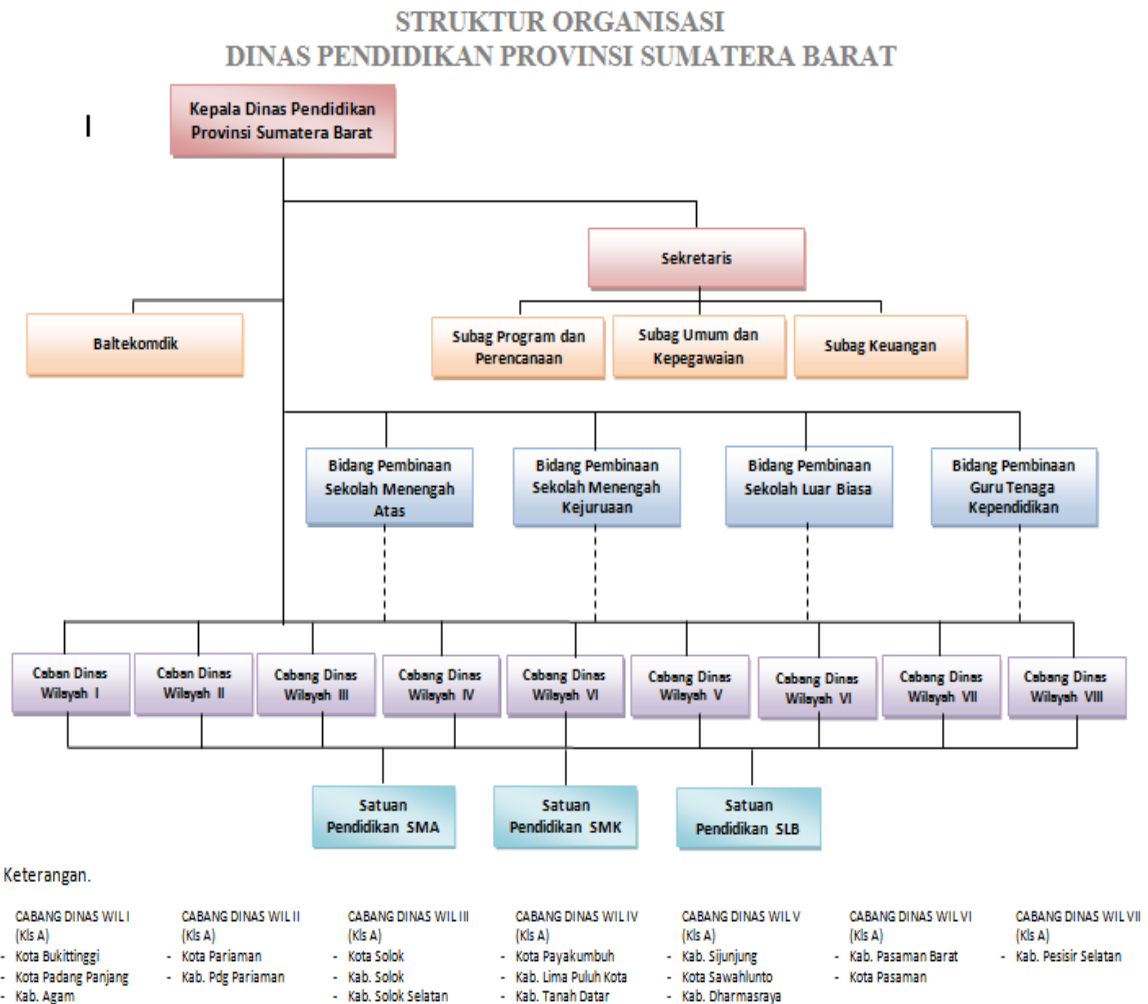
- a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
- c) Membina dan memfasilitasi bidang pendidikan, lingkup provinsi dan kabupaten/Kota
- d) Melaksanakan kesekretariatan dan perencanaan Dinas
- e) Melakukan pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Sekolah Luar Biasa (SLB)
- f) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan
- g) Melaksanakan Koordinasi dan Pembinaan dengan Cabang Dinas Pendidikan
- h) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Pergub No. 42 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat, dengan diberlakukannya Pergub tersebut dan dilantiknya pejabat struktural eselon IV a dan IV b pada Cabang Dinas dan hilangnya pejabat eselon IV a dibawah Bidang SMA/K dan SLB Bagan Struktur Organisasi SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan telah ditetapkannya Pergub No. 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan,



Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sehingga terjadi perubahan bagan struktur organisasi dalam Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :



Berdasarkan kondisi kelembagaan dan struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di atas, terdiri dari :

1. Sekretariat;
2. Pembinaan SMA;
3. Pembinaan SMK;
4. Pembinaan SLB;
5. Pembinaan GTK;
6. Cabang Dinas;
7. UPTD Baltekkomdik;
8. Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi masing – masing unit kerja adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat,

Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian yakni :

1. Sub Bagian Program dan Perencanaan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan

Sekretariat memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu :

Tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan program, anggaran, laporan, keuangan, kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol.

Fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan laporan;
- b) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja;
- c) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan perencanaan;
- d) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan
- e) Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- f) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan;
- g) Penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian, penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan.

b. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas pokok dan fungsi

Tugas pokok :

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan pembinaan Sekolah Menengah Atas.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan kesiswaan Sekolah Menengah Atas;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga teknis Sekolah Menengah Atas; dan
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana Sekolah Menengah Atas.



c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas pokok dan fungsi:

Tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan kesiswaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga teknis Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan.

d. Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa

Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa, mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Tugas pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan pembinaan Sekolah Luar Biasa.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan kesiswaan Sekolah Luar Biasa;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga teknis Sekolah Luar Biasa; dan
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana Sekolah Luar Biasa.



e. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa

Fungsi:

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang meliputi pendataan, peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi, sertifikasi, pengembangan karir, peningkatan kesejahteraan dan pemberian penghargaan.
- b. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja tentang pembinaan calon kepala sekolah, pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa; dan
- c. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja penyediaan wadah bagi guru untuk mempublikasikan penulisan karya ilmiah baik cetak maupun elektronik.

f. Cabang Dinas

Dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang urusan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, maka dibentuk Cabang Dinas dengan pergub No. 42 Tahun 2018 sebagai berikut :

- a) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Bukittinggi, Kelas A (Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kab. Agam)
- b) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Pariaman, Kelas A (Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman)
- c) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Aro Suka, Kelas A (Kab. Solok, Kota Solok dan Kab. Solok Selatan)
- d) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Payakumbuh, Kelas A (Kota payakumbuh, Kab. Tanah datar, Kab. Lima Puluh Kota)
- e) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Muaro Sijunjung, Kelas A (Kab. Sijunjung, Kab. Sawahlunto, Kab.Dharmasraya)
- f) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Kinali, Kelas A (Kab. Pasaman, dan kab. Pasaman Barat)
- g) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Painan, Kelas A (Kab. Pesisir Selatan)
- h) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII, Kelas A (Kab. Kep. Mentawai)



Susunan organisasi Cabang Dinas kelas A terdiri dari :

- a. Kepala Cabang
- b. Subag tata usaha
- c. Seksi sekolah menengah Atas
- d. Seksi Sekolah menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa
- e. Kelompok jabatan Fungsional

Tugas Pokok :

Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan;
- b. Pelaksanaan koordinasi, teknis operasional, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan; dan
- c. Pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas Pendidikan;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Baltekkomdik membawahi 3 Sub Bagian yakni :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Subag Pengembangan Program dan evaluasi;
3. Subag Pemanfaatan Media, TIK Pendidikan.

Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (UPTD) Baltekkomdik memiliki

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas yaitu teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan.

Fungsi :

- a. Memfasilitasi Penyusunan rencana dan program kerja seksi-seksi di lingkungan UPTD Baltekkomdik
- b. Memfasilitasi penyusunan, perumusan dan komunikasi pendidikan
- c. Memfasilitasi pelayanan pengembangan teknologi dan komunikasi pendidikan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

Pengawas Sekolah, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Kondisi Kepegawaian

Jumlah Karyawan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan akhir Tahun 2020 tercatat sebanyak 12.752 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan berdasarkan Golongan dan Eselon
Tahun 2020

NO	Gol / Ruang	Eleson				Non Eleson		Jumlah
		I	II	III	IV	Tenaga Fungsional	Staf	
	<u>GOLONGAN. IV</u>							0
1	Golongan. IV/e						0	0
2	Golongan. IV/d					2	0	2
3	Golongan. IV/c		1			27	0	28
4	Golongan. IV/b			5		1557	2	1564
5	Golongan. IV/a				19	3604	32	3655
	Jumlah Gol. IV		1	5	19	5190	34	5249
	<u>Golongan. III</u>							
1	Golongan III/d				4	2095	117	2216
2	Golongan III/c				0	2046	86	2132
3	Golongan III/b				2	1105	336	1443
4	Golongan III/a				0	211	683	894
	Jumlah Gol. III		0	0	6	5457	1222	6685
	<u>Golongan. II</u>							
1	Golongan II/d					8	70	78
2	Golongan II/c					10	70	80
3	Golongan II/b					18	204	222
4	Golongan II/a					0	16	16
	Jumlah Gol. II					36	360	396
	<u>Golongan. I</u>							
1	Golongan I/d						23	23
2	Golongan I/c						6	6
3	Golongan I/b						13	13
4	Golongan I/a						1	1
	Jumlah Gol. I						42	42
	JML TOTAL	-	-	5	25	10.683	1.658	12.372



B. Aspek Strategis Organisasi

Pelaksanaan pendidikan perlu memperhatikan sisi aspek kualitatif maupun kuantitatif dari perencanaan pendidikan provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- a. Tersedianya lembaga layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi A dan B 60,05%;
- b. Tersedianya tenaga pendidik dengan kualifikasi $\geq$ S1 96,35%;
- c. UKG 61,63%;
- d. Lulusan SMA/SMK 99,85%;
- e. Kepedulian masyarakat terhadap pendidikan yang masih tinggi
- f. Budaya ABS-SBK (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) sebagai jati diri masyarakat Sumatera Barat.

C. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Penentuan isu strategis di bidang pembangunan pendidikan di provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- a. Belum Optimalnya Peran Pelaku Pembangunan Pendidikan;
- b. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang Berkualitas belum Maksimal;
- c. Peningkatan Kualitas Pembelajaran belum Maksimal;
- d. Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK);
- e. Memudarnya Karakter Siswa dan Jati Diri atau Disintegrasi Bangsa.

Inovasi layanan pendidikan yang membentuk karakter rendah. Disamping itu adanya beberapa tantangan atau ancaman dari luar, yakni :

- a. Berlakunya pasar bebas ASEAN yang belum siap untuk dihadapi;
- b. Pesatnya Peningkatan Kualitas Pendidikan Provinsi tetangga;
- c. Meningkatnya pengaruh narkoba dan pergaulan bebas; dan
- d. Isorientasi penggunaan teknologi informasi.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA Tahun 2020

Tabel 2
PERJANJIAN KINERJA (PK)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan	Target Kinerja (%)
1.	Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan	1. APM SMA/SMK/MA/SMALB/ Paket C	$\frac{\text{Jumlah murid SMA/SMK/MA /SMALB/Paket C usia 16 - 18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun}}$	74.35
		2. APK SMA/SMK/MA/SMALB/ Paket C	$\frac{\text{Jumlah murid SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun}}$	97.8
		3. Angka Putus SMA	$\frac{\text{Jumlah siswa putus sekolah SMA}}{\text{Jumlah siswa pada jenjang SMA Thn Ajaran Sebelumnya}}$	0.63
		4. Angka Putus SMK	$\frac{\text{Jumlah siswa putus sekolah SMK}}{\text{Jumlah siswa pada jenjang SMK Thn Ajaran Sebelumnya}}$	0.73
2.	Meningkatnya Integritas Peserta Didik	1. Indek integritas UN SMA/SMK	Perhitungan kualitatif	69.47
		2. Indek Integritas Peserta Didik	Perhitungan kualitatif	82
3.	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	1. Angka Kelulusan SMA/MA/LB/Paket C	$\frac{\text{Jumlah murid SMA/MA/LB/Paket C yg lulus tahun ini}}{\text{Jumlah murid SMA/MA/LB/Paket C pada jenjang akhir thn ajaran sebelumnya}}$	98.25
		2. Angka Kelulusan SMK	$\frac{\text{Jumlah murid SMK yg lulus tahun ini}}{\text{Jumlah murid SMK pada jenjang akhir thn ajaran sebelumnya}}$	98.15
		3. Angka tidak melanjutkan ke SMA	$\frac{\text{Jumlah murid baru kelas 10}}{\text{jumlah murid lulus kelas 9}}$	2.74
		4. Kompetensi tenaga kependidikan/ UKG	$\frac{\text{Jumlah tenaga kependidikan yg nilainya baik}}{\text{jumlah tenaga kependidikan yg mengikuti ukk}}$	80.93
		5. Jumlah sekolah menengah yang terakreditasi minimal B	$\frac{\text{Jumlah sekolah menengah yang terakreditasi minimal B}}{\text{Jumlah sekolah menengah yang ada}}$	78.18
		6. Jumlah sekolah Luar Biasa yang terakreditasi minimal B	$\frac{\text{Jumlah sekolah luar biasa yang terakreditasi minimal B}}{\text{Jumlah sekolah luar biasa yang ada}}$	78.18
4.	Meningkatnya Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk PT dan pasar Kerja	1. Jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke PT	$\frac{\text{Jumlah mahasiswa baru}}{\text{Jumlah lulusan SMA}}$	50
		2. Jumlah lulusan SMK yang diterima di DUDI (Dunia Usaha dan Industri)	$\frac{\text{Jumlah lulusan SMK yang diterima di dunia kerja}}{\text{Jumlah lulusan SMK}}$	50
5.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Penilaian	B



Untuk mendukung ketercapaian arah kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dialokasikan anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 645.900.897.652,- dan realisasi Rp. 619.386.623.576,- (95,89 %), realisasi fisik 100 %, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
ANGGARAN PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

.NO	URAIAN	PAGU (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
BELANJA LANGSUNG		645.900.897.652	Dinas Pendidikan Prov. Sumabr
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.241.815.778	Sekretaris
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.182.409.501	Sekretaris
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.578.002.112	Sekretaris
6	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	105.000.000	Kabid GTK
8	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	11.020.212.700	Kabid P-SLB
9	Program Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan	6.623.776.750	Sekretaris, Kabid GTK, Kabid P-SMK, Kabid P-SMA, Kepala Baltekkomdik
10	Program Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	155.662.089.180	Kabid P-SMA, Kabid P-SMK
11	Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah	448.487.591.631	Sekretaris, Kabid P-SMA, Kabid P-SMK



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

$$\text{capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

$$\text{capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/ kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Adapun skala penilaian yang digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja setiap sasaran mengacu pada Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana berikut :

Tabel 4
Skala Penilaian dalam Menilai Tingkat Capaian Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	tinggi
3	66% ≤ 75%	sedang
4	51% ≤ 65%	rendah
5	≤ 50%	sangat rendah



Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian belum memenuhi/ masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Di bawah ini akan disajikan informasi capaian kinerja pembangunan pendidikan yang telah dicapai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5
Capaian Kinerja Pembangunan Pendidikan

ARAH KEBIJAKAN 1:					
Meningkatkan Akses dan pemerataan Pendidikan					
Indikator Kinerja	2018	2019	2020		
	Realisasi		Target	Realisasi	% Capaian
1. APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	67.47	72.63	74.35	73.13	98.36
2. APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	94.74	95.58	97.8	91.7	93.76
3. Angka Putus SMA	0.52	0.0019	0.63	0.63	100
4. Angka Putus SMK			0.73	0.67	91.78
ARAH KEBIJAKAN 2:					
Meningkatnya Integritas Peserta Didik					
Indikator Kinerja	2018	2019	2020		
	Realisasi		Target	Realisasi	% Capaian
1. Indek integritas UN SMA/SMK	67.52	88.24	69.47	-	-
2. Indek Integritas Peserta Didik	96.9	76.18	82	78.68	95.95



ARAH KEBIJAKAN 3:					
Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan					
Indikator Kinerja	2018	2019	2020		
	Realisasi		Target	Realisasi	% Capaian
1. Angka Kelulusan SMA/MA/LB/Paket C	99.32	97	98.25	98.58	100.34
2. Angka Kelulusan SMK	99.35	98.76	98.15	95.98	97.79
3. Angka tidak melanjutkan ke SMA	0.53	2.54	2.74	0.45	183.58
4. Kompetensi tenaga kependidikan/ UKG	75.80	87	80.93	89.50	110.59
5. Jumlah sekolah menengah yang terakreditasi minimal B	85.96	89.24	78.18	77.16	98.70
6. Jumlah sekolah Luar Biasa yang terakreditasi minimal B	65.82	99	78.18	51.63	66.04
ARAH KEBIJAKAN 4:					
Meningkatnya Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk Perguruan Tinggi dan pasar Kerja					
Indikator Kinerja	2018	2019	2020		
	Realisasi		Target	Realisasi	% Capaian
1. Jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke PT	43.56	42.16	50.00	27.13	54.26
2. Jumlah lulusan SMK yang diterima di DUDI (Dunia Usaha dan Industri)	28	46.12	50.00	27.59	55.18
ARAH KEBIJAKAN 5:					
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi					
Indikator Kinerja	2018	2019	2020		
	Realisasi		Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	58.51 (CC)	58.52 (CC)	B (Tentatif)	60.84 (B)	100
2. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program / Kegiatan	F : 94,67 K: 97,54	F : 97,72 K: 96.74	98%	F : 100% K: 98.01%	F : 102.04 K : 100.01



B. HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

Tabel 6

REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN S.D TW IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapain target kinerja	Hambatan/Permasalahan dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang Dilakukan
1	Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan	1. APM SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C	TW IV	74,35	73,13	98,36	Survey lapangan, perencanaan rehab dan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan fisik serta sarana dan prasarana	1) Belum terpenuhi kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah 2) Belum selarasnya program pembinaan pendidikan SMA dan SMK oleh Provinsi dengan program pembinaan pendidikan di Kabupaten/Kota 3) masih kurangnya akses digitalisasi pendidikan dan implementasi merdeka belajar	
		2. APK SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C	TW IV	97,8	91,7	93,76	Survey lapangan, perencanaan rehab dan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan fisik serta sarana dan prasarana		
		3. Angka Putus SMA	TW IV	0,63	0,63	100,00	Menginstruksi sekolah untuk membuat regulasi yang jelas untuk mengeluarkan siswa, pihak sekolah harus mengetahui alasan jelas kenapa seorang siswa mengundurkan diri, mencari solusi terbaik untuk masalah-masalah khusus yang tidak terpecahkan		
		4. Angka Putus SMK	TW IV	0,73	0,67	91,78	Menginstruksi sekolah untuk membuat regulasi yang jelas untuk mengeluarkan siswa, pihak sekolah harus mengetahui alasan jelas kenapa seorang siswa mengundurkan diri, mencari solusi terbaik untuk masalah-masalah khusus yang tidak terpecahkan		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapai target kinerja	Hambatan/Permasalahan dalam Pencapaian Target
2	Meningkatnya Integritas Peserta Didik	1. Indek integritas UN SMA/SMK	TW IV	69,47	0	0,00	Menigkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik	1) Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan (kepala sekolah, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, pengawas) belum sesuai peraturan perundang-undangan.
		2. Indek Integritas Peserta Didik	TW IV	82	78,68	95,95	Memenuhi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
3	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	1. Angka Kelulusan SMA/MA/LB/Paket C	TW IV	98,25	98,58	100,34	Memenuhi Standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	1) Belum semua Guru memiliki kompetensi mengajar minimal (D4/S1) 2) Sebaran Guru belum merata antara perkotaan dan pedesaan 3) Masih terbatasnya pelayanan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus
		2. Angka Kelulusan SMK	TW IV	98,15	95,98	97,79	Memenuhi operasional pendidikan khusus dan layanan khusus	
		3. Angka tidak melanjutkan ke SMA	TW IV	2,74	0,45	183,58	memenuhi pelayanan pendidikan dalam proses penerapan kurikulum bagi siswa, guru dan pengawas	
		4. Kompetensi tenaga kependidikan/ UK	TW IV	80,93	89,5	110,59		
		5. Jumlah sekolah menengah yang terakreditasi minimal B	TW IV	78,18	77,16	98,70		
		6. Jumlah sekolah Luar Biasa yang terakreditasi minimal B	TW IV	78,18	51,63	66,04	Melaksanakan penyaluran dana untuk program pendidikan khusus dan layanan khusus	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %	Aksi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja	Hambatan/Permasalahan dalam Pencapaian Target
4	Meningkatnya Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk Perguruan Tinggi dan pasar Kerja	1. Jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke PT	TW IV	50	27,13	54,26	Memenuhi operasional terkait dengan lpeningkatan mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Menengah	Masih belum idealnya kondisi SMK yang ada sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan SMK masih belum mampu menghasilkan tamatan sesuai kebutuhan dan tuntutan dunia kerja dan masyarakat
		2. Jumlah lulusan SMK yang diterima di DUDI (Dunia Usaha dan Industri)	TW IV	50	27,59	55,18	Merencanakan konsep pelaksanaan, menyebar undangan rapat semua unsur terkait yang akan dilibatkan, melakukan persiapan untuk pelaksanaan yang telah direncanakan	
							Memenuhi operasional terkait dengan lpeningkatan mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Menengah	
5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	TW IV	B	B	100	Penyediaan Kebutuhan Administrasi PerkantoranPenyediaan Sarana dan Pemeliharaannya	1) Penyelenggaraan administrasi sebagai pendukung dalam pencapaian kualitas pendidikan belum mengacu pada Standar Nasional 2) Keterlambatan proses penganggaran di provinsi
		2. Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan	TW IV	98	100	102,04	Survey lapangan, perencanaan rehab dan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan fisik serta sarana dan prasarana	
		3. Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	TW IV	98	98,01	100,01	Melaksanakan penganggaran, realisasi dan pelaporan yang berhubungan dengan SKPD Dinas Pendidikan	
							Melaksanakan pendataan melalui Dapodik, memakai data Dapodik untuk penganggaran	

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2020

Sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kewajiban memenuhi target kinerja arah kebijakan dengan indikator kinerja utama sebagai tolok ukur capaian program yang telah ditetapkan. Ketercapaian indikator kinerja tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan peralihan kewenangan yang diamanatkan UU No 23 tahun 2014, pembangunan Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat lebih dititik beratkan pada pembangunan program :

- a. Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan
- c. Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan; dan
- d. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan

Berikut disajikan tingkat ketercapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 berdasarkan 5 sasaran strategis. Kelima arah kebijakan tersebut didukung oleh program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat, Bagian, Bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Berikut disajikan penjelasannya :

Tabel 7
Perbandingan Arah Kebijakan 1
Meningkatkan Akses dan pemerataan Pendidikan Tahun (2018, 2019 dan 2020)

ARAH KEBIJAKAN 1:					
Meningkatkan Akses dan pemerataan Pendidikan					
Indikator Kinerja	2018	2019	2020		
	Realisasi		Target	Realisasi	% Capaian
1. APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	67.47	72.63	74,35	73,13	98,36
2. APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	94.74	95.58	97,8	91,7	93,76
3. Angka Putus SMA	0.52	0.0019	0,63	0,63	100,00
4. Angka Putus SMK	1.62	0	0,73	0,67	91,78



Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan didukung oleh Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Program Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah, Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah dengan anggaran Rp 183.665.339.884,- dan realisasi sebesar Rp 162.131.349.849,- (93,38%).

Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut :

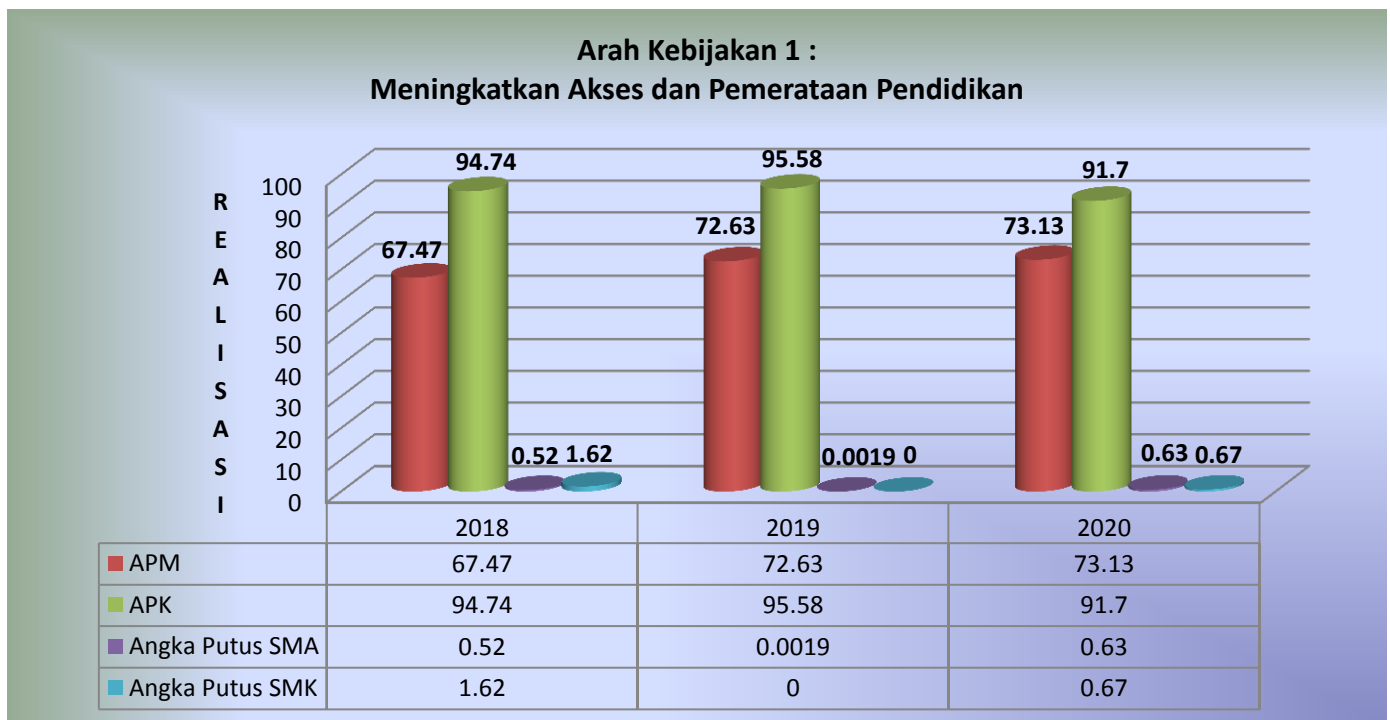
- (1) Pembangunan Laboratorium IPA SMA,
- (2) Pembangunan Fasilitas Gedung SMA,
- (3) Pembangunan Fasilitas Gedung SMK,
- (4) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA,
- (5) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK,
- (6) Renovasi Aula/ Gedung Serbaguna SMAN 3 Padang,
- (7) Penyediaan Sarana dan Prasarana SMA (DAK),
- (8) Penyediaan Sarana dan Prasarana SMK (DAK),
- (9) Penyediaan Sarana dan Prasarana SLB (DAK),
- (10) Pengadaan Moubiler/ Furniture Laboratorium SMA,
- (11) Pengadaan Moubiler Ruang Kelas SMA,
- (12) Rehabilitasi Gedung SMA,
- (13) Pengadaan Komputer dan Jaringan SMA,
- (14) Pengadaan Moubiler Ruang Kelas SMK,
- (15) Pengadaan Komputer dan Jaringan SMK,
- (16) Pengadaan Sarana Pembelajaran Multimedia Interaktif SMK,
- (17) Pengelolaan SLB Negeri 1 Pariaman Kota Pariaman,
- (18) Pengelolaan SMA Negeri 1 Pariaman Kota Pariaman,
- (19) Pengelolaan SMA Negeri 2 Pariaman Kota Pariaman,
- (20) Pengelolaan SMA Negeri 3 Pariaman Kota Pariaman,
- (21) Pengelolaan SMA Negeri 4 Pariaman Kota Pariaman,
- (22) Pengelolaan SMA Negeri 5 Pariaman Kota Pariaman,
- (23) Pengelolaan SMA Negeri 6 Pariaman Kota Pariaman,
- (24) Pengelolaan SMK Negeri 1 Pariaman Kota Pariaman,
- (25) Pengelolaan SMK Negeri 2 Pariaman Kota Pariaman,
- (26) Pengelolaan SMK Negeri 3 Pariaman Kota Pariaman,
- (27) Pengelolaan SMK Negeri 4 Pariaman Kota Pariaman.



Program ini bertujuan untuk:

1. Mendorong tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya.
2. Meningkatkan kepercayaan publik bahwa sekolah tersebut dapat menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar Nasional.
3. Memberikan layanan kepada publik bahwa siswa mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar nasional.

Pencapaian target kinerja atas program ini adalah sebagai berikut :



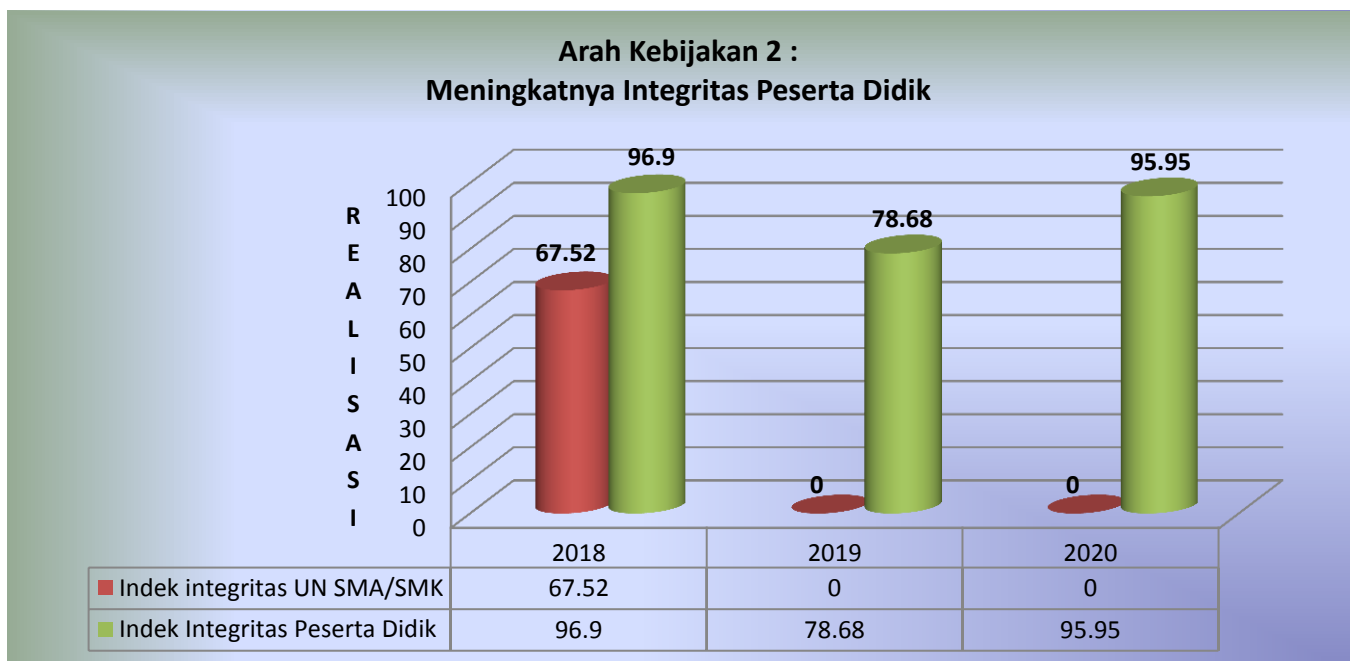
Gambar 1
Grafik Perbandingan Arah Kebijakan 1
Meningkatkan akses Pemerataan Pendidikan

Grafik 1. Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan menunjukkan persentase capaian APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C sebesar 67.47% di tahun 2018, kemudian di tahun 2019 menjadi 72.63%, dan meningkat di tahun 2020 menjadi 73.13%. Sedangkan Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan menunjukkan persentase capaian APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C sebesar 94.74% di tahun 2018, kemudian meningkat menjadi 95.58% di tahun 2019, dan terus meningkat di tahun 2019 menjadi 95.58%. Untuk Angka Putus SMA sebesar 0.52% di tahun 2018, menurun pada tahun 2019 menjadi 0.19% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 0.67%. Sedangkan Angka Putus SMK sebesar 1.62% di tahun 2018, menurun di tahun 2019 menjadi 0% dan meningkat 0.67% di tahun 2020.

Tabel 8
Arah Kebijakan 2
Meningkatnya Integritas Peserta Didik

ARAH KEBIJAKAN 2:					
Meningkatnya Integritas Peserta Didik					
Indikator Kinerja	2018	2019	2020		
	Realisasi		Target	Realisasi	% Capaian
Indek Integritas UN SMA/SMK	67.52	88.24	69.47	0	0
Indek Integritas Peserta Didik	96.9	76.18	82	78.68	95.95

Meningkatnya Integritas Peserta Didik didukung oleh Program Pendidikan Berkarakter, Dengan anggaran Rp. 180.000.000,-. Di program tersebut akan dilaksanakan kegiatan Parade Cinta Tanah Air, akan tetapi dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 kegiatan ini di refocusing untuk penanganan penurunan tingkat penyebaran Covid-19 tersebut.



Gambar 2
Grafik Perbandingan Arah Kebijakan 2
Meningkatnya Integritas Peserta Didik

Grafik 2 Meningkatkan Integritas Peserta Didik dalam hal ini indeks integritas UN SMA/SMK pada tahun 2018 persentase 67.52%, pada tahun 2019 berdasarkan Permendikbud 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional maka untuk Ujian Nasional di tiadakan pelaksanaannya sampai pada tahun 2020.



Tabel 9
Arah Kebijakan 3
Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
ARAH KEBIJAKAN 3:

Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan					
Indikator Kinerja	2018	2019	2020		
	Realisasi		Target	Realisasi	% Capaian
Angka Kelulusan SMA/MA/LB/Paket C	99.32	97	98.25	98.58	100,34
Angka Kelulusan SMK	99.35	98.76	98.15	95.98	97,79
Angka Tidak Melanjutkan ke SMA	0.53	2.54	2.74	0.45	183,58
Kompetensi tenaga Pendidik / UKG	75.80	87	80.93	89.50	110,59
Jumlah Sekolah Menengah yang terakreditasi B	85.96	89.24	78.18	77.16	98,70
Jumlah Sekolah Luar Biasa yang terakreditasi Minimal B	65.82	99	78.18	51.63	66,04

Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan didukung oleh Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Program Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan, serta Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah, dengan pagu anggaran Rp 329.161.344.400,- dan realisasi Rp 329.063.723.800,- (96,92%). Hal ini terletak pada ketersediaan guru dan tenaga kependidikan berdasarkan keahlian khusus tentunya kekurangan ini semakin banyak terasa, apalagi jika dikaitkan dengan pencapaian keunggulan dan daya saing pendidikan di level regional, tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan sekali dengan jumlah guru pada SMA dan SMK se-Sumatera Barat sebesar 10.612 PNS dan 5.144 Non PNS.

Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan diwujudkan melalui kegiatan :

a. Meningkatkan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah yaitu :

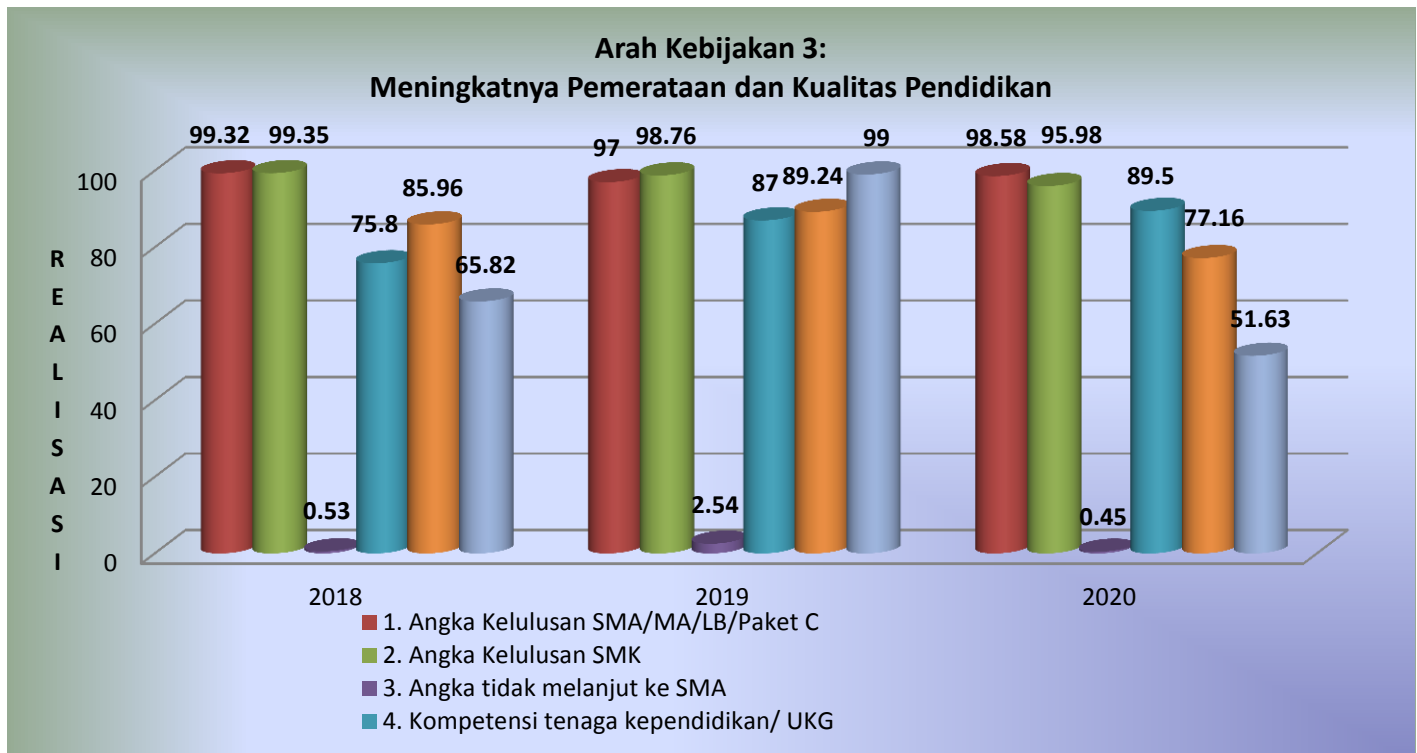
- (1) Evaluasi Dan Validasi Implementasi KTSP SMA, SMK dan SLB,
- (2) Pengembangan Duta Rumah Belajar Sumatera Barat,
- (3) Pemberdayaan Dewan Pendidikan,
- (4) Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas,
- (5) Pembinaan dan Pengelolaan Tunjangan Guru dan Pengawas



b. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan relevansi Pendidikan, yaitu :

- (1) US SDLB, UAS SLB, Penulisan Master Soal US SD/MI dan Paket A
- (2) Dana BOS SMA Negeri (DAK Non Fisik)
- (3) Dana BOS SMK Negeri (DAK Non Fisik)
- (4) Dana BOS SLB Negeri (DAK Non Fisik)

Pencapaian target kinerja atas program ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3
Grafik Perbandingan Arah Kebijakan 3
Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Grafik 3. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan menunjukkan persentase capaian Angka Kelulusan SMA/MA/LB/Paket C sebesar 99.32% di tahun 2018, kemudian 97% tahun 2019 dan di tahun 2020 meningkat menjadi 98.58%. Angka Kelulusan SMK menunjukkan persentase capaian sebesar 99.35% di tahun 2018, kemudian 98.76% tahun 2019 dan di tahun 2020 menjadi 95.98%. Angka tidak melanjutkan ke SMA menunjukkan persentase capaian sebesar 0.53% di tahun 2018, di tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 2.54% dan di tahun 2020 menjadi sebesar 0.45%. Kompetensi tenaga kependidikan/UKG menunjukkan persentase capaian sebesar 75.8% di tahun 2018, kemudian meningkat menjadi sebesar 87% di tahun 2019 dan di tahun 2020 tidak dapat dihitung berapa realisasi dalam indikator kompetensi tenaga kependidikan/UKG. Jumlah Sekolah Menengah yang terakreditasi minimal B menunjukkan persentase capaian sebesar 85.96% di tahun 2018, kemudian meningkat menjadi sebesar 89.24% di tahun

2019 dan di tahun 2020 menjadi 77.16%. Dan jumlah Sekolah Luar Biasa yang terakreditasi minimal B menunjukkan persentase capaian sebesar 65.82% di tahun 2018, kemudian meningkat menjadi sebesar 99% di tahun 2019 dan di tahun 2020 menjadi 17.65%.

Tabel 10

Arah Kebijakan 4
Meningkatnya Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk Perguruan Tinggi dan Pasar Kerja

ARAH KEBIJAKAN 4:					
Meningkatnya Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk perguruan Tinggi dan pasar Kerja					
Indikator Kinerja	2018	2019	2020		
	Realisasi		Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Lulusan SMA yang Melanjutkan ke PT	43.56	42.16	50	27.13	54.26
Jumlah Lulusan SMK yang diterima di DUDI (Dunia Usaha dan Industri)	28	46.12	50	27.59	55.18

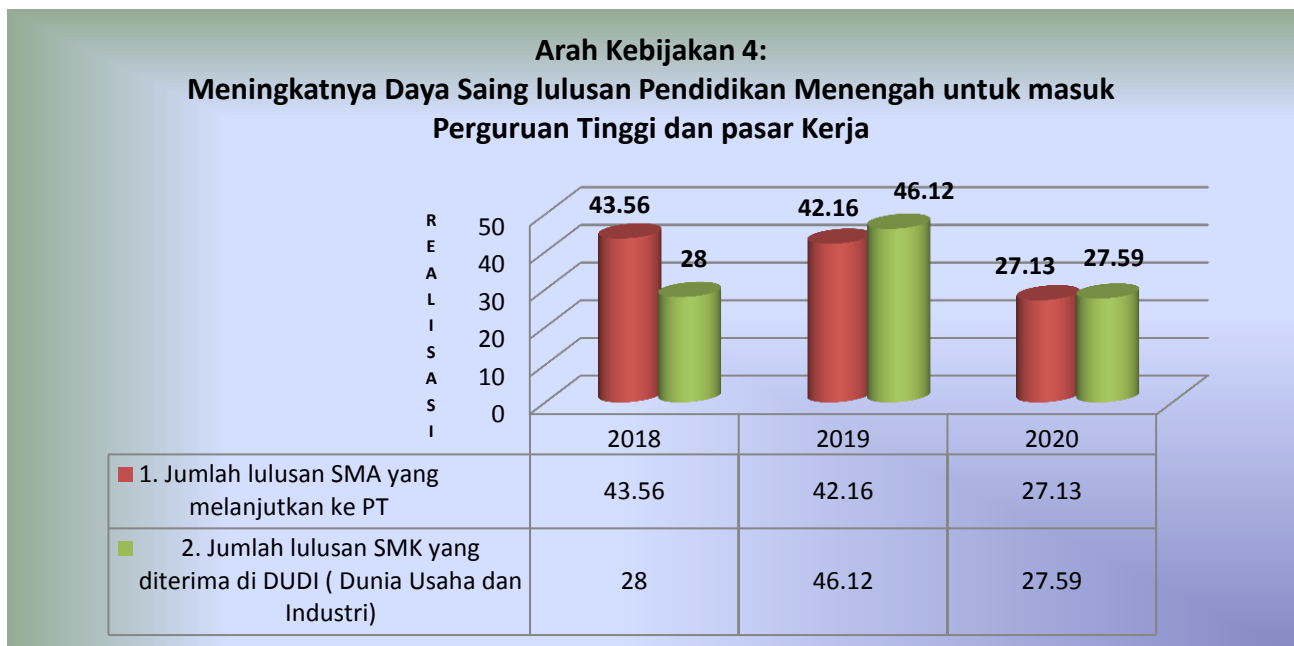
Meningkatnya Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk Perguruan Tinggi dan pasar Kerja didukung oleh Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Program Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan, dan Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah dengan pagu anggaran Rp 50.361.619.446,- dan realisasi Rp 47.494.298.196,- (73,63%).

Meningkatnya Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk Perguruan Tinggi dan pasar Kerja diwujudkan melalui kegiatan :

- (1) Penjaminan Keberlanjutan Pendidikan
- (2) Seleksi Pembekalan dan Pembinaan ADEM dan ADIT
- (3) Verifikasi Tempat Ujian Kompetensi Keahlian SMK
- (4) Silpa Dana BOS SMA, SMK dan SLB (DAK Non Fisik) Tahun 2019



Pencapaian target kinerja atas program ini adalah sebagai berikut:

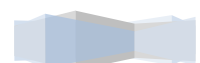


Gambar 4
Grafik Perbandingan Arah Kebijakan 4
Meningkatnya Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk Perguruan Tinggi dan Pasar Kerja

Grafik 4. Meningkatnya Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk Perguruan Tinggi dan pasar kerja menunjukkan persentase capaian Jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke PT sebesar 43.56% di tahun 2018, kemudian tahun 2019 menjadi 42.16% dan di tahun 2020 menjadi 27.13%. Sedangkan Jumlah lulusan SMK yang diterima di DUDI menunjukkan persentase capaian sebesar 28% di tahun 2018, kemudian di tahun 2019 menjadi 46.12% dan di tahun 2020 menjadi sebesar 27.59%.

Tabel 11.
Arah Kebijakan 5
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

ARAH KEBIJAKAN 5:					
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi					
Indikator Kinerja	2018	2019	2020		
	Realisasi		Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	58.51 (CC)	58.52 (CC)	B (Tentatif)	60.84 (B)	100
2. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	F : 94.67 K: 97.54	F : 97.72 K: 96.74	98%	F : 100 K: 98.01	F : 102.04 K: 100.01



Meningkatnya Tata Kelola Organisasi didukung oleh program didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dan Program Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan dengan pagu anggaran Rp 84.163.804.397,- dan realisasi Rp 81.999.179.981,- (91%).

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi diwujudkan melalui kegiatan :

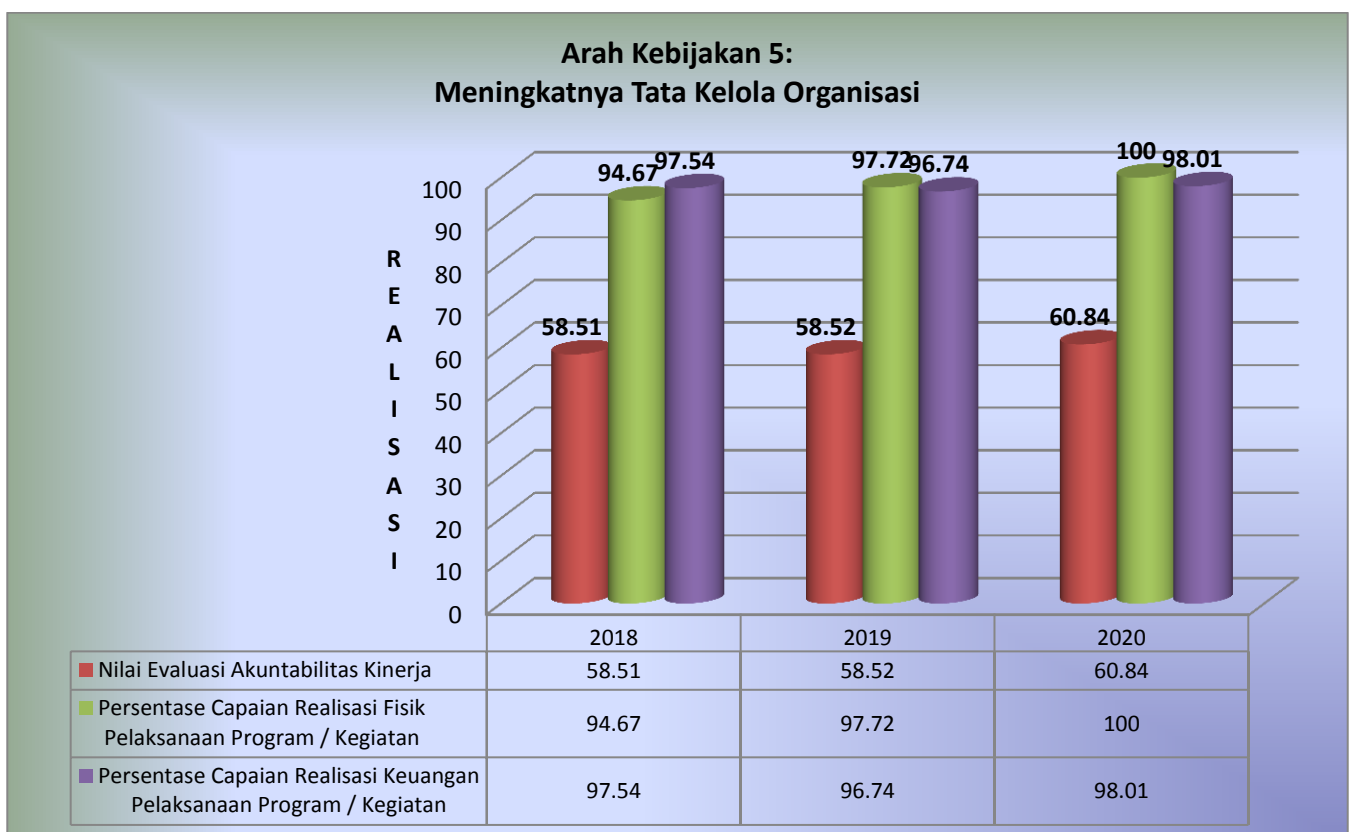
a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi diwujudkan melalui

1. **Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dengan kegiatan :** 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, 3) Penyediaan Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor, 4) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor, 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, 8) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, 10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah, 11) Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi, 12) Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur, 13) Penyediaan Makanan dan Minuman
2. **Meningkatnya Pengelolaan Sapras**
(1) Pengadaan Komputer dan jaringan Komputerisasi, (2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, (3) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, (4) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, (5) Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor, (6) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. **Meningkatnya Pengelolaan Cabang Dinas**
(1) Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah I (Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kab. Pasaman), (2) Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah II (Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman), (3) Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah III (Kab. Solok, Kota Solok, Kab. Solok Selatan), (4) Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah IV (Kota Payakumbuh, Kab. Tanah Datar, Kab. Lima Puluh Kota), (5) Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah V (Kab. Sijunjung, Kota Sawahlunto dan Kab. Dharmasraya), (6) Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah VI (Kab. Agam dan Kab. Pasaman Barat), (7) Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah VII (Kab. Pesisir Selatan), (8) Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah VIII (Kab. Kepulauan Mentawai)



- b. **Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan diwujudkan melalui :**
1. **Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja) dan Pelaporan Organisasi dengan kegiatan :** (1) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, 2) Pengelolaan Dana BOS
 2. **Meningkatnya Kualitas Pelaporan Organisasi, dengan kegiatan**
 - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
 - 2) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
- c. **Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan, diwujudkan melalui :**
1. **Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan dengan kegiatan :**
 - 1) Penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan, 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/ Tahunan, 3) Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD,

Pencapaian target kinerja atas program ini adalah sebagai berikut:



Gambar 5
Grafik Perbandingan Arah Kebijakan 5
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi



Grafik 5. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dituangkan dalam 3 indikator kinerja yaitu:

- a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja persentase capaian sebesar 58.51% di tahun 2018, kemudian menjadi sebesar 58.52% tahun 2019 dan diharapkan meningkat di tahun 2020 menjadi 60.84.
- b. Capaian realisasi keuangan menunjukkan persentase capaian sebesar 97.54% di tahun 2018, kemudian menjadi sebesar 96.74% tahun 2019 dan meningkat di tahun 2020 menjadi 98.01%.
- c. Capaian realisasi fisik program kegiatan menunjukkan persentase capaian sebesar 94.67% di tahun 2018, kemudian meningkat menjadi sebesar 97.72% tahun 2019 dan terus meningkat menjadi sebesar 100% di tahun 2020.

1. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021

Visi pembangunan Sumatera Barat yang ingin diwujudkan pada periode 2016 - 2021 adalah: *“Terwujudnya Sumberdaya Manusia Sumatera Barat yang Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing”*. Untuk mewujudkan visi pembangunan Sumatera Barat 2016 - 2021 tersebut, maka dirumuskanlah lima **Misi** sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan;
- b. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme guru dan tenaga kependidikan;
- c. Meningkatkan mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan literasi teknologi informasi;
- d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola layanan pendidikan; dan
- e. Mengimplementasikan pendidikan berkarakter madani

2. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Perubahan Tahun 2016 – 2021

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat telah mengacu pada RPJMD Tahun 2016 - 2021 yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Sumatera Barat, khususnya terkait dengan meningkatkan manusia yang cerdas, sehat,



beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi secara singkat substansi Renstra Dinas Pendidikan, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 12
Target Tahunan Capaian Tujuan Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat

Tujuan	Indikator	Target Tiap Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Terwujudnya Peningkatan Tingkat Pendidikan Masyarakat	1. Harapan lama sekolah	13,94	14,20	14,50	14,80	15,09
	2. Rata-rata lama sekolah	8,46	8,49	8,56	8,63	8,66

Tabel 13
Target Tahunan Capaian Sasaran Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat.

Misi 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter Dan BerkualitasTinggi

Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Indikator : Harapan lama sekolah dan rata - rata lama sekolah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tiap Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan	APM SMA/SMK/MA/SM ALB/Paket C	68.85	71.03	73.27	74.35	74.6
		APK SMA/SMK/MA/SM ALB/Paket C	86.20	86.58	86.96	97.8	98.03
		Angka Putus SMA	0.004	0.003	0.002	0.63	0.58
		Angka Putus SMK	0.01	0.01	0	0.73	0.68
2.	Meningkatnya Integritas Peserta Didik	Indek integritas UN SMA/SMK	66.57	67.52	68.49	69.47	-
		Indek Integritas Peserta Didik	68.27	71.92	76.34	82	85



3.	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Angka Kelulusan SMA/MA/LB/Paket C	100.83	101.72	102.62	98.25	98.5
		Angka Kelulusan SMK	100.49	101.25	102.01	98.15	99.12
		Angka tidak melanjutkan ke SMA	4.86	5.31	5.81	2.74	1.92
		Kompetensi tenaga kependidikan/ UKG	74.02	75.80	77.62	80.93	-
		Jumlah sekolah menengah yang terakreditasi minimal B	85.07	85.96	86.65	78.18	79.74
		Jumlah sekolah Luar Biasa yang terakreditasi minimal B	61.32	65.82	71.15	78.18	79.74
4	Meningkatnya Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk Perguruan Tinggi dan pasar Kerja	Jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke PT	44.99	48.08	51.38	50	52.05
		Jumlah lulusan SMK yang diterima di DUDI (Dunia Usaha dan Industri)	27.71	28.79	29.92	50	58
5.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	58.51	58.52	B	B	BB



2.1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pendidikan, maka strategi penyelarasan strategi peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat di level regional dengan program pembangunan pendidikan yang telah dituangkan dalam RPJMD Sumatera Barat 2016 - 2021. Sebagai berikut :

Tabel 14.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera

Misi : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter dan Berkualitas Tinggi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Peningkatan Tingkat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan	Meningkatkan mutu dan daya saing sekolah menengah melalui perbaikan infrastruktur sekolah menengah	-Meningkatkan ketersediaan SMA, SMK dan SLB, melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) -Meningkatkan ketersediaan SMK yang terkait dengan prioritas pembangunan daerah Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) secara merata
	Meningkatnya Integritas Peserta Didik	Meningkatkan Pendidikan Karakter Melalui Penyehatan Lingkungan Internal Sekolah Menengah yang Menyenangkan dengan Menanamkan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Kearifan Budaya Lokal dalam Proses Pembelajaran Oleh Guru dan warga sekolah menengah	Menumbuhkan dan meningkatkan budi pekerti melalui pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal Minangkabau



	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Melalui Sistem Pendidikan dan Pelatihan untuk Penguasaan ICT dengan Menjalin Kerjasama dengan Sekolah Kejuruan dan Mitra di Luar Negeri	Memfasilitasi peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan sekolah termasuk sekolah khusus dan layanan khusus
		Meningkatkan kualitas, kuantitas dan relevansi pendidikan	Penyediaan pendidikan inklusif dan layanan khusus pada pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti
	Meningkatnya Daya Saing Lulusan Pendidikan Menengah untuk Masuk Perguruan Tinggi atau Pasar Bekerja	Meningkatkan mutu, relevansi, daya saing pendidikan menengah dan literasi teknologi informasi	Penyediaan layanan dan kebutuhan operasional pendidikan bagi sekolah menengah
		Meningkatkan dan Mewujudkan Keterserapan Lulusan SMA dan SMK di Perguruan Tinggi dan di Dunia Usaha/Industri dan Kewirausahaan	Menjalin kerjasama dengan Dunia Usaha/Industri dan luar negeri
	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Tata kelola Layanan Pendidikan	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas tata kelola layanan pendidikan melalui penyehatan manajemen organisasi sekolah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Tata kelola Layanan Pendidikan



D. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 diimplementasikan melalui 8 program yaitu :

1. Program Penunjang (*Urusan Pemerintahan*) terdiri dari 3 Program :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Program Prioritas (*Non Urusan Pemerintahan*) terdiri dari 5 Program :
 - a. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 - b. Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus
 - c. Program Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan
 - d. Program Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah
 - e. Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah

Dari 8 program tersebut terdiri dari 74 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a) Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan outcome dari program yaitu Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 12 bulan yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	sasaran	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	Buah
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	11	Unit
5	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	12	Bulan
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	Bulan
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan



9	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12	Bulan
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	12	Bulan
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	12	Bulan
12	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	12	Bulan
13	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	12	Bulan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan outcome dari program yaitu berfungsinya sarana dan prasarana aparatur yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	sasaran	
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20	Unit
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4	Paket
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13	Unit
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	12	Bulan
5	Pengadaan Komputer dan jaringan Komputerisasi	74	Unit

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan outcome dari program yaitu: Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	sasaran	
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	5	Laporan
2	Penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan	12	Bulan
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Bulan
4	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	4	Dokumen



5	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan	1	Laporan
6	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	8	Cabang Dinas

b) Program Prioritas

1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan kependidikan, dengan outcome dari program yaitu : [1] Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) [2] Kompetensi Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Laboran, Pustakawan dan Pegawai TU Sekolah) [3] Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru SMA, SMK dan PLB) yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	sasaran	
1	Pembinaan dan Pengelolaan Tunjangan Guru dan Pengawas	1	Kegiatan

2. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, dengan outcome dari program yaitu Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan khusus yang bermutu dan relevan serta berkesetaraan di semua Kab/Kota yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	sasaran	
1	Dana BOS SLB Negeri (DAK Non Fisik)	29	Sekolah
2	US SDLB, UAS SLB, Penulisan Master Soal US SD/MI dan Paket A	13	6 Mapel USBN SDLB, dan 7 Mapel UAS
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana SLB (DAK)	39	13 SLB Negeri dan Swasta Rehabilitasi dan Pembangunan, 26 Paket sarana Belajar SLB Negeri dan Swasta di Sumbar
4	Pengelolaan SLB Negeri 1 Pariaman Kota Pariaman	12	Bulan



3. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan, dengan outcome dari program yaitu : [1] Sekolah Menengah/ SLB Terakreditasi Minimal B [2] APK PAUD [3] APM SD/ SDLB/ Paket A/MI [4] APM SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	sasaran	
1	Pemberdayaan Dewan Pendidikan	12	Bulan
2	Pengelolaan Dana BOS	688	Sekolah
3	Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas	4500	Dokumen
4	Evaluasi Dan Validasi Implementasi KTSP SMA, SMK dan SLB	1112	KTSP
5	Penjaminan Keberlanjutan Pendidikan	40	%
6	Pengembangan Duta Rumah Belajar Sumatera Barat	50	Orang
7	Pengelolaan UPTD Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Baltekomdik) Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	12	Bulan

4. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah, dengan outcome dari program ini yaitu Terjangkaunya layanan Pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	sasaran	
1	Pembangunan Laboratorium IPA SMA	6	Paket
2	Pembangunan Fasilitas Gedung SMA	146	Paket
3	Pembangunan Fasilitas Gedung SMK	46	Sekolah
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	20	Paket
5	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK	6	Paket
6	Renovasi Aula/ Gedung Serbaguna SMAN 3 Padang	1	Paket
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana SMA (DAK)	148	Unit
8	Penyediaan Sarana dan Prasarana SMK (DAK)	55	Sekolah



5. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah, dengan outcome dari program ini, yaitu : [1] Angka kelulusan SMK [2] Lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan industri (DUDI) [3] Angka Kelulusan SMA/ MA/ SMALB/ Paket C yang didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	sasaran	
1	Seleksi Pembekalan dan Pembinaan ADEM dan ADIT	50	Orang
2	Pengadaan Moubiler/ Furniture Laboratorium SMA	7	Paket
3	Pengadaan Moubiler Ruang Kelas SMA	9	Paket
4	Rehabilitasi Gedung SMA	10	Lokasi
5	Pengadaan Komputer dan Jaringan SMA	44	Paket
6	Dana BOS SMA Negeri (DAK Non Fisik)	236	Sekolah
7	Verifikasi Tempat Ujian Kompetensi Keahlian SMK	214	Sekolah
8	Pengadaan Moubiler Ruang Kelas SMK	3	Paket
9	Pengadaan Komputer dan Jaringan SMK	17	Paket
10	Pengadaan Sarana Pembelajaran Multimedia Interaktif SMK	10	Paket
11	Dana BOS SMK Negeri (DAK Non Fisik)	111	Sekolah
12	Pengelolaan SMA Negeri 1 Pariaman Kota Pariaman	12	Bulan
13	Pengelolaan SMA Negeri 2 Pariaman Kota Pariaman	12	Bulan
14	Pengelolaan SMA Negeri 3 Pariaman Kota Pariaman	12	Bulan
15	Pengelolaan SMA Negeri 4 Pariaman Kota Pariaman	12	Bulan
16	Pengelolaan SMA Negeri 5 Pariaman Kota Pariaman	12	Bulan
17	Pengelolaan SMA Negeri 6 Pariaman Kota Pariaman	12	Bulan



18	Pengelolaan SMK Negeri 1 Pariaman Kota Pariaman	12	Bulan
19	Pengelolaan SMK Negeri 2 Pariaman Kota Pariaman	12	Bulan
20	Pengelolaan SMK Negeri 3 Pariaman Kota Pariaman	12	Bulan
21	Pengelolaan SMK Negeri 4 Pariaman Kota Pariaman	12	Bulan
22	Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah I (Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kab. Pasaman)	12	Bulan
23	Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah II (Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman)	12	Bulan
24	Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah III (Kab. Solok, Kota Solok, Kab. Solok Selatan)	12	Bulan
25	Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah IV (Kota Payakumbuh, Kab. Tanah Datar, Kab. Lima Puluh Kota)	12	Bulan
26	Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah V (Kab. Sijunjung, Kota Sawahlunto dan Kab. Dharmasraya)	12	Bulan
27	Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah VI (Kab. Agam dan Kab. Pasaman Barat)	12	Bulan
28	Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah VII (Kab. Pesisir Selatan)	12	Bulan
29	Pengelolaan Cabang Dinas Wilayah VIII (Kab. Kepulauan Mentawai)	12	Bulan
30	Silpa Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SMA, SMK dan SLB (DAK Non Fisik) / Kurang Salur BOS Reguler SMA, SMK dan SLB 2019 (DAK Non Fisik)	79	Afirmasi 36 sek, Kinerja 43 sek



Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Baraat memiliki struktur anggaran belanja daerah dalam DPA 2020 yang terdiri dari 2 (dua) pos pengeluaran, yaitu :

- (1) Belanja tidak langsung, meliputi: belanja pegawai yang dipergunakan untuk membayar belanja :
 - a. gaji dan tunjangan pegawai,
 - b. tambahan pengasilan PNS,
 - c. insentif pemungutan retribusi daerah
- (2) Belanja langsung,
Untuk menunjang pelaksanaan Program sebanyak 9 (sembilan) program dengan 111 (seratus sebelas) kegiatan.

DPA Dinas Pendidikan Provinsi Sumaera Barat 2020, dengan total alokasi anggaran belanja adalah sebanyak Rp 2.022.195.515.425,- dengan Realisasi sebesar Rp. 1.981.946.647.304,- (98,01%) dan Fisik (100%), yang terdiri:

1. Belanja Tidak langsung Rp. 1.376.294.617.773,- dengan realisasi Rp. 1.362.560.023.728,- (99,00%),
2. Belanja langsung Rp. 645.900.897.652,- dengan realisasi Rp. 619.386.623.576,- (95,89%). Terlampir laporan bulanan

Untuk kinerja keuangan, dari delapan program yang ditangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

NO.	Rentang Capaian Anggaran	Kategori Capaian
1	91% ≤ 100%	sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	tinggi
3	66% ≤ 75 %	sedang
4	51% ≤ 65%	rendah
5	≤ 50%	sangat rendah



Berikut tentang Rekapitulasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan sampai akhir 2020, dengan rincian daya serap pada tabel berikut :

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2020

NO	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
DPA DINAS PENDIDIKAN				
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG (PEGAWAI)	1.376.294.617.773	1.362.560.023.728	99,00
	1. Gaji dan tunjangan	1.344.984.202.766	1.362.560.023.728	99,00
	2. Belanja Tamsil PNS	31.310.256.007	30.533.511.483	97,52
	3. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	159.000	0	0
2	BELANJA LANGSUNG	645.900.897.652	619.386.623.576	95,89
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.241.815.778	4.004.379.760	94,40
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.182.409.501	4.844.996.270	93,49
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.578.002.112	14.386.494.258	98,69
4	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	105.000.000	104.958.450	99,96
5	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	11.020.212.700	10.818.879.420	98,17
6	Program Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan	6.623.776.750	3.704.311.222	55,92
7	Program Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	155.662.089.180	135.015.673.870	86,74
8	Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah	448.487.591.631,00	446.506.930.326	99,56
Jumlah		2.022.195.515.425,03	1.981.946.647.304	98,01



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini merupakan laporan yang diharapkan menjadi sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang pencapaian target kinerja dan proses pencapaiannya yang berkaitan dengan amanat yang diterima. Amanat yang dimaksud adalah janji Dinas Pendidikan Provinsi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan Gubernur Sumatera Barat.

Untuk itu diharapkan agar laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat agar berusaha sungguh-sungguh sehingga dapat mewujudkan lembaga yang dikenal berkualitas baik dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur pendidikan.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memiliki 5 (Lima) sasaran strategis dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta 15 (lima belas) target kinerja yang mendukung berjalannya sasaran strategis tersebut.

Secara umum capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 relatif baik dan berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut terbukti dari besarnya tingkat capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sesuai pengukuran kinerja, dari sebanyak 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, rata-rata capaian kinerjanya tinggi di tahun 2020. Namun demikian tetap diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam matriks Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021. Namun, pada beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) ada penurunan yang terdampak dari terjadinya Pandemi Covid-19.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.



B. SARAN / REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LAKIP Tahun 2020, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan PNS.

Akhir kata dengan segala keterbatasan yang ada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat telah berupaya maksimal untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan baik dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan kualitas dan relevansi, serta peningkatan tata kelola pendidikan.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2020 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2020 berdasarkan Rencana Strategik (Renstra) dan rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan disusun berdasarkan Laporan Capaian Kinerja yang dilaksanakan oleh sekretariat, bagian, bidang kerja dan UPT Dinas Pendidikan yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian laporan kinerja Dinas Pendidikan merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi terhadap pencapaian kinerja sekretariat, bagian, bidang maupun UPT secara keseluruhan.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Esselon II Tahun 2020 (terlampir)
2. Perjanjian Kinerja Pejabat Esselon III dan IV (terlampir)

